



Academic policy for establishing new junior high schools in South Tangerang City

Mustofa Kamil¹, Neneng Nurjanah², Muhammad Yus Firdaus³, Bambang Mardi Sentosa⁴, Purnomo⁵,
Cucu Sukmana⁶

^{1,2,3,4}Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

^{5,6}Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

m.kamil@unis.ac.id¹, zensmartconsultant@gmail.com², yus.firdaus@unis.ac.id³, bmardi@unis.ac.id⁴,
purnomo@upi.edu⁵, cucusukmana@upi.edu⁶

ABSTRACT

This study explores the academic policy regarding establishing new Junior High Schools (SMP) in South Tangerang City in response to the rising number of Elementary School (SD) graduates and the limited availability of secondary education facilities. Using a theoretical and quantitative approach, the research applies the "Social Demand Approach" planning model to identify the need for new schools. Findings reveal a significant imbalance between the number of SD and SMP, particularly in Setu, North Serpong, Pondok Aren, and Ciputat sub-districts, highlighting an urgent need for new school units (USB) and classrooms (RKB) to ensure equitable access to quality education. The analysis is supported by geographic and demographic data, considering essential variables such as student group sizes (*rombel*). Therefore, the policy for establishing new schools in South Tangerang City must be implemented promptly to address primary and secondary education challenges, ensuring adequate facilities for the growing student population. The research emphasizes the importance of addressing educational infrastructure needs to support student's educational progress and highlights the critical role of geographic information systems (GIS) in mapping school locations and planning future school development.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 9 Aug 2024

Revised: 17 Nov 2024

Accepted: 20 Nov 2024

Available online: 26 Nov 2024

Publish: 29 Nov 2024

Keyword:

education policy; establishment of SMP; social demand approach; student groups

Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed open-access journal.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan akademik terkait pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kota Tangerang Selatan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan terbatasnya ketersediaan fasilitas pendidikan menengah. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan kuantitatif, penelitian ini menerapkan model perencanaan "Social Demand Approach" untuk mengidentifikasi kebutuhan akan sekolah baru. Temuan menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah SD dan SMP, khususnya di kecamatan Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat, menyoroti kebutuhan mendesak akan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas (RKB) untuk memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas. Analisis didukung oleh data geografis dan demografis, mempertimbangkan variabel penting seperti ukuran kelompok peserta didik (*rombel*). Oleh karena itu, kebijakan pendirian sekolah baru di Kota Tangerang Selatan harus dilaksanakan segera untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan dasar dan menengah, serta memastikan fasilitas yang memadai bagi populasi peserta didik yang berkembang. Penelitian ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk mendukung kemajuan peserta didik. Sistem informasi geografis (GIS) memainkan peran penting dalam pemetaan lokasi sekolah dan perencanaan pengembangan pendidikan di masa depan.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan; kelompok belajar pendirian SMP; social demand approach

How to cite (APA 7)

Kamil, M., Nurjanah, N., Firdaus, M. Y., Sentosa, B. M., Purnomo, P., & Sukmana, C. (2024). Academic policy for establishing new junior high schools in South Tangerang City. *Inovasi Kurikulum*, 21(4), 2199-2214.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.



Copyright

2024, Mustofa Kamil, Neneng Nurjanah, Muhammad Yus Firdaus, Bambang Mardi Sentosa, Purnomo, Cucu Sukmana. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: m.kamil@unis.ac.id

INTRODUCTION

Pendirian sekolah baru di Indonesia merupakan langkah strategis yang krusial dalam meningkatkan akses pendidikan menengah bagi anak-anak usia sekolah. Kebijakan pendirian sekolah secara umum penting mengingat angka partisipasi pendidikan menengah yang masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang (Alfasisromarakap *et al.*, 2021; Nasir *et al.*, 2023). Penambahan sekolah baru diharapkan dapat mengurangi disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia (Shaturaev, 2021). Selain itu, pendirian sekolah baru juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah (Patandung & Panggua, 2022). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pendirian sekolah baru. Kebijakan ini mencakup aspek perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan yang harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan desentralisasi pendidikan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana strategis pendirian sekolah baru, yang melibatkan analisis kebutuhan lokal, ketersediaan lahan, dan sumber daya manusia yang memadai. Regulasi ini juga menekankan pentingnya inklusivitas, memastikan bahwa sekolah yang didirikan mampu mengakomodasi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dan kebutuhan khusus.

Strategi implementasi kebijakan pendirian sekolah baru melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan rencana strategis. Proses ini meliputi analisis kebutuhan lokal, ketersediaan lahan, serta sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan layanan pendidikan bermutu secara merata dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang, yang mencakup pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sejalan dengan pemikiran akademik dan kebijakan serta kondisi riil tentang kebutuhan pendidikan dasar, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang berkewajiban memberikan layanan pendidikan bermutu baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi secara merata dan berkeadilan bagi seluruh warga negara (Gunawan, 2020).

Pendidikan dasar sebagai tahap awal dalam membangun bangsa penting dalam membangun fondasi kemampuan SDM unggul sebelum melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (Sumiyaty *et al.*, 2023). Konsep tersebut memberikan makna, bahwa pendidikan dasar diharapkan mampu membentuk karakter dan kemampuan dasar untuk belajar, dengan tidak hanya sebagai sebuah proses pengajaran teoritis dan hafalan yang dilakukan tetapi sarat dengan keutuhan bagaimana sebuah proses pendidikan melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia pendidikan dasar. Untuk itulah bagaimana kondisi pendidikan dasar ini agar berada pada posisi yang benar sesuai kebutuhan pengembangan SDM bermutu dan mudah diakses masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang baik.

Mendirikan sekolah baru di Indonesia melibatkan navigasi melalui lanskap kebijakan pendidikan yang kompleks, kebutuhan masyarakat, dan pengembangan kurikulum. Reformasi pendidikan di Indonesia mendorong perubahan internal, seperti pemulihan otonomi pedagogis sekolah, serta perubahan eksternal yang melibatkan pendidikan sebagai bagian dari reformasi sosial ekonomi yang lebih luas (Rosser, 2023; Wang *et al.*, 2023). Keterlibatan masyarakat dan implementasi kebijakan penting dalam mendirikan sekolah baru, dengan model seperti Sekolah Indonesia di Riyadh (ISR) menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dan kemitraan masyarakat (Widhawati, 2022). Selain itu, keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan juga dapat menjadi salah satu jembatan untuk membentuk kebijakan pendidikan yang inklusif, toleran, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Nasril *et al.*, 2024). Sistem zonasi penerimaan peserta didik, yang diterapkan di Indonesia, mencerminkan tantangan dan peluang dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dengan membawa sekolah lebih

dekat ke tempat tinggal peserta didik, meskipun menghadapi masalah infrastruktur dan persepsi publik (Nurlailiyah, 2019; Syakarofath *et al.*, 2020; Yuliani, 2021).

Saat mendirikan sekolah baru di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan berbagai kebutuhan pendidikan dan kerangka kebijakan, termasuk integrasi budaya dan lingkungan lokal ke dalam kurikulum (Efendi & Sholeh, 2023). Keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan lembaga pendidikan baru. Namun, tantangan seperti alokasi sumber daya dan pelatihan guru harus ditangani dengan serius untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi semua peserta didik, yang pada akhirnya mendukung pengembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan efektif di seluruh negeri (Kusuma *et al.*, 2024; Triarsuci *et al.*, 2024).

Kajian literatur mulai disajikan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan metode campuran untuk mengeksplorasi urgensi pembangunan infrastruktur sekolah dalam merespons kebijakan zonasi yang berdampak pada akses peserta didik ke sekolah negeri di Indonesia, khususnya di Kota Batu. Proses perumusan kebijakan, khususnya pada tahap *agenda setting*, menunjukkan pentingnya perluasan sekolah negeri di wilayah-wilayah yang kurang terlayani oleh zonasi untuk memastikan akses pendidikan yang merata serta mendukung pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal (Setyawan & Firdausi, 2021). Penelitian ini memperkuat landasan kebijakan pada artikel ini dengan menyoroti pentingnya pertimbangan zonasi dalam perencanaan infrastruktur pendidikan di wilayah yang mengalami ketimpangan fasilitas pendidikan.

Penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Chili cenderung merespons insentif kompetitif dari kebijakan pendidikan berbasis pasar, yang dipengaruhi oleh posisi sosial-ekonomi di pasar pendidikan lokal. Temuan ini mengungkap bahwa sekolah-sekolah lebih sering berfokus pada menjaga posisi pasar daripada peningkatan kualitas pendidikan, melalui seleksi peserta didik, pemasaran, dan pengajaran yang berfokus pada ujian (Zancajo, 2020). Kajian ini relevan dalam mendukung analisis artikel ini mengenai pentingnya kebijakan yang responsif dan adaptif dalam mendorong pemerataan pendidikan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami tekanan pasar pendidikan. Kedua literatur ini menggarisbawahi pentingnya analisis kontekstual yang mendalam dalam kebijakan pendidikan untuk menjawab tantangan infrastruktur pendidikan di Kota Tangerang Selatan dan mendukung upaya dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif serta berkualitas.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam pendekatan evaluasi kebutuhan sekolah dengan memanfaatkan teknologi *Geographic Information System* (GIS) untuk pemetaan lokasi sekolah yang lebih akurat. Hal ini berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak fokus pada analisis kebijakan tanpa mengintegrasikan teknologi spasial. Permasalahan penelitian ini adalah ketidakmerataan akses pendidikan menengah di Kota Tangerang Selatan dan kebutuhan akan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mendukung kebijakan pendirian sekolah baru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebutuhan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kota Tangerang Selatan dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademis, hukum, dan kebijakan, serta kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menyediakan rekomendasi berbasis data mengenai jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) yang diperlukan, guna memastikan pemerataan akses pendidikan dasar bagi semua anak usia sekolah. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan kebutuhan pendidikan di setiap kecamatan, menggunakan GIS untuk memetakan lokasi sekolah secara akurat dan mendukung perencanaan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

LITERATURE REVIEW

Perencanaan Pendidikan

Pendekatan *Social Demand Approach* dalam perencanaan pendidikan menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berdasarkan data kuantitatif mengenai jumlah peserta didik dan fasilitas yang tersedia. *Social Demand Approach* dalam perencanaan pendidikan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan data kuantitatif terkait jumlah peserta didik dan ketersediaan fasilitas pendidikan (Sutcher et al., 2019; Welsh & Swain, 2020). Dalam penelitian ini, *Social Demand Approach* digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan sekolah baru di daerah-daerah yang mengalami ketimpangan fasilitas pendidikan, seperti Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat di Kota Tangerang Selatan. Melalui pendekatan ini, perencana pendidikan dapat menilai apakah fasilitas yang ada mampu menampung jumlah peserta didik yang terus bertambah, dan dapat dengan lebih akurat mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan penambahan sekolah atau ruang kelas untuk mengatasi kekurangan kapasitas. Melalui pendekatan ini, perencana pendidikan dapat menilai sejauh mana ketersediaan fasilitas pendidikan saat ini dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat, serta mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan tambahan sekolah atau ruang kelas untuk mengatasi kekurangan kapasitas (Sutcher et al., 2019). *Social Demand Approach* memastikan bahwa kebijakan pendidikan dan pembangunan fasilitas didasarkan pada data nyata dan kebutuhan konkret masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan (Okolie et al., 2019; Penuel et al., 2020).

Economics of Education berfokus pada analisis biaya dan manfaat dari investasi dalam sektor pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru. Teori ini mengevaluasi pengeluaran yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan sekolah dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan (Bellei & Munoz, 2023). Evaluasi pendirian sekolah baru mencakup analisis biaya pembangunan, biaya operasional, dan potensi dampak ekonomi positif seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas ekonomi (Surur et al., 2020). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi ini, kebijakan pendidikan dapat dirancang untuk memastikan bahwa investasi dalam pendidikan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Integrasi kedua teori ini *Social Demand Approach* dan *Economics of Education* dalam perencanaan pendidikan membantu dalam pengambilan keputusan yang informatif dan efektif mengenai pendirian sekolah baru, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Kurikulum dan Pengembangan Sekolah Baru

Curriculum Design Theory berfokus pada proses perancangan dan pengembangan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di sekolah baru. Teori ini melibatkan pemilihan materi ajar yang sesuai, metode pengajaran yang efektif, dan sistem penilaian yang komprehensif (Martin et al., 2019). Desain kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta standar akademik dan kultural yang relevan (Kieran & Anderson, 2019). Pendekatan ini memastikan bahwa kurikulum tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis peserta didik, tetapi juga mencerminkan konteks sosial dan budaya di mana sekolah beroperasi (Bovill & Woolmer, 2019; Pak et al., 2020). Proses perancangan ini sering kali melibatkan kolaborasi antara pendidik, ahli kurikulum, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan kurikulum yang inklusif dan adaptif, serta mampu memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas tinggi.

Needs Assessment adalah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan spesifik peserta didik dan masyarakat di sekolah baru. Penilaian kebutuhan ini mencakup pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan analisis data pendidikan untuk mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dan tujuan

pendidikan yang diinginkan (Heilmann & Bertone, 2021; Menggo *et al.*, 2019). Dengan informasi yang diperoleh, pengembang kurikulum dapat merancang materi ajar dan metode pengajaran yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan tersebut. *Needs Assessment* memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan tidak hanya memenuhi standar akademis tetapi juga relevan dan dapat menjawab tantangan yang dihadapi peserta didik (Ajjawi *et al.*, 2020; Mpuangan & Ntombela, 2024). Proses ini berfungsi sebagai dasar untuk penyesuaian kurikulum yang berkelanjutan dan efektif, menjamin bahwa program pendidikan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat dan peserta didik.

Geographic Information System (GIS)

Geographic Information System (GIS) adalah sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menampilkan data geografis atau spasial. GIS berperan penting dalam berbagai bidang, seperti perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, serta sektor-sektor lain yang membutuhkan analisis berbasis lokasi (Pei *et al.*, 2021). Teknologi GIS memungkinkan integrasi data spasial dengan data atribut, sehingga pengguna dapat memvisualisasikan dan menganalisis informasi dalam konteks geografis. Salah satu keunggulan utama GIS adalah kemampuannya untuk menggabungkan berbagai jenis data spasial dari sumber yang berbeda dan menampilkan informasi tersebut dalam bentuk peta interaktif (Sami & Hussein, 2024). Pengguna dapat menggunakan GIS untuk menggali pola atau tren, melakukan pemodelan prediktif, serta membuat keputusan berbasis data dengan lebih akurat. GIS juga mendukung pemetaan dan analisis data real-time, yang sangat berguna untuk respons bencana, transportasi, dan pengelolaan infrastruktur (Zhou *et al.*, 2020).

GIS dalam penelitian berperan penting sebagai alat analisis yang memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi fasilitas pendidikan. Teknologi ini mengintegrasikan data spasial dan atribut demografis untuk memetakan lokasi sekolah dan menentukan kesenjangan akses pendidikan. Dengan peta interaktif yang dihasilkan, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area dengan kebutuhan mendesak untuk pendirian sekolah baru, menilai aksesibilitas berdasarkan jarak dan kepadatan penduduk, serta merancang kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Peran GIS tidak hanya meningkatkan akurasi dalam perencanaan pendidikan tetapi juga memastikan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara memadai.

Dalam dunia pendidikan, GIS semakin relevan karena memungkinkan institusi untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan pendidikan berdasarkan distribusi geografis. Dengan menggunakan GIS, dinas pendidikan atau lembaga terkait dapat mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana, menentukan lokasi sekolah yang ideal, serta memantau distribusi guru dan sumber daya pendidikan lainnya (Köse *et al.*, 2021). GIS juga membantu dalam analisis demografi, sehingga pemerintah dapat merencanakan pembangunan sekolah baru yang sesuai dengan kebutuhan populasi setempat. Terkait dengan pemetaan lokasi sekolah, GIS dapat digunakan dalam membantu pemangku kepentingan untuk menentukan letak strategis sekolah baru atau mengidentifikasi lokasi sekolah yang membutuhkan perbaikan (Maige *et al.*, 2022). Dengan menggunakan GIS, dapat dilakukan analisis distribusi sekolah berdasarkan aksesibilitas, kepadatan penduduk, dan jarak ke pusat-pusat pemukiman (Al-Sabbagh, 2022). Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang merata terhadap fasilitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau terpinggirkan.

METHODS

Model analisis penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yakni menggunakan pendekatan teoritis pustaka (*Library Research*) dengan mengedepankan teori kebijakan, kebijakan (*policy*) hukum, sosiologis dan filosofis, juga menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengacu pada model perencanaan "*Social Demand Approach*". *Social Demand Approach* adalah pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat yang ditentukan melalui partisipasi dan preferensi mereka (Bibri *et al.*, 2020; Paul, 2024). Model ini dianggap sangat cocok untuk digunakan dalam perencanaan kebutuhan pendidikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat sebagai respons terhadap permintaan (*demand*) akan pemberian kesempatan pendidikan terwujud. Fungsi pemerintah dan pemerintah daerah adalah memenuhi permintaan tersebut melalui penyediaan (*supply*) kesempatan belajar dengan cara mendirikan sekolah-sekolah baru dengan prioritas pendirian di daerah-daerah (wilayah) yang sangat membutuhkan atau daerah dimana masyarakat sulit mengakses pendidikan.

Penggunaan data lokal mengenai kapasitas ruang kelas dan distribusi sekolah yang ada, dengan prioritas pada daerah-daerah yang paling membutuhkan fasilitas pendidikan, seperti Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat. Modifikasi ini memungkinkan *Social Demand Approach* tidak hanya berfungsi sebagai model analisis kebutuhan tetapi juga sebagai panduan untuk perencanaan yang lebih terarah. Dengan menekankan pada penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, model ini disesuaikan agar dapat mengidentifikasi wilayah yang memerlukan prioritas pembangunan dan mengarahkan sumber daya pendidikan ke daerah dengan akses yang terbatas.

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Kebutuhan Pendidikan

Data mengenai kebutuhan pendidikan masyarakat dikumpulkan melalui survei terhadap 300 responden dari kecamatan-kecamatan prioritas (Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat) yang telah diidentifikasi mengalami ketimpangan akses pendidikan. Teknik sampling yang digunakan adalah *stratified random sampling* untuk memastikan keterwakilan populasi berdasarkan demografi peserta didik, kepadatan penduduk, dan kondisi aksesibilitas ke fasilitas pendidikan.

2. Pengumpulan Data Potensi Peserta didik

Data potensi peserta didik, yaitu jumlah peserta didik yang memerlukan fasilitas pendidikan tambahan, diperoleh melalui *database* pendidikan daerah dan survei sekolah. Survei ini melibatkan kepala sekolah di setiap kecamatan untuk memperoleh informasi tentang kapasitas ruang kelas dan jumlah lulusan tahunan.

3. Pengumpulan Data Geografis Menggunakan GIS

Pengumpulan data geografis dilakukan dengan memanfaatkan *Geographic Information System* (GIS) untuk memetakan lokasi sekolah dan kondisi demografis di area penelitian. Tahapan ini meliputi identifikasi koordinat geografis sekolah-sekolah yang ada dan overlay dengan data kependudukan, yang memvisualisasikan jarak akses peserta didik ke sekolah terdekat. GIS juga digunakan untuk menganalisis kepadatan populasi peserta didik di daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan, sehingga mempermudah pemetaan kebutuhan sekolah baru secara akurat.

4. Analisis Data dengan Model Proyeksi dan Selisih

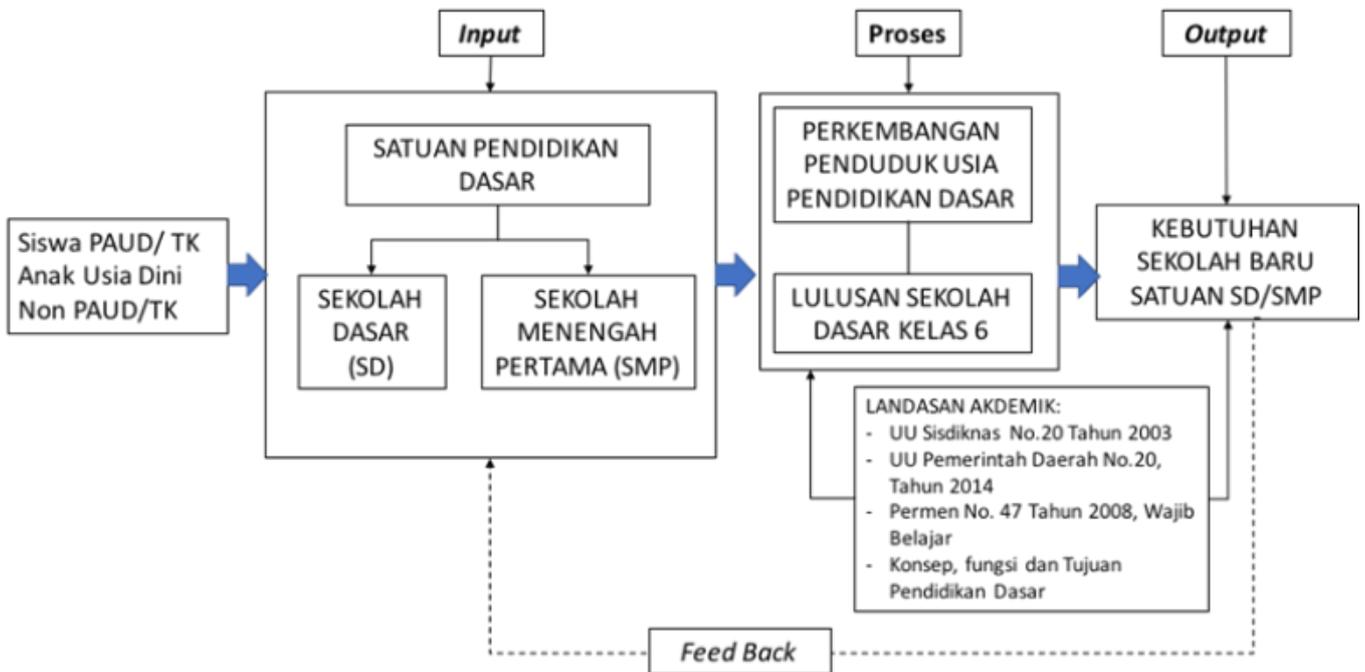
Analisis data dilakukan menggunakan dua model proyeksi:

- Model Proyeksi Jumlah Peserta didik: Model ini mempertimbangkan data demografis untuk memperkirakan jumlah peserta didik yang akan membutuhkan tempat di sekolah menengah beberapa tahun ke depan.
- Model Selisih: Model ini digunakan untuk membandingkan jumlah peserta didik dengan kapasitas sekolah yang tersedia, sehingga mengidentifikasi kekurangan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB) di tingkat SMP.

Hasil perhitungan dari kedua model ini digunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan pembangunan sekolah baru, dan perbedaan hasil antara model proyeksi dan model selisih menjadi dasar bagi prioritas wilayah yang paling mendesak membutuhkan fasilitas pendidikan tambahan. Siklus umpan balik dalam proses ini memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan berdasarkan implementasi dan respons masyarakat. Hasil dari rekomendasi kebijakan yang diterapkan terus dimonitor dan dievaluasi agar penyesuaian dapat dilakukan untuk memastikan pemerataan dan kualitas pendidikan yang optimal di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan.

RESULTS AND DISCUSSION

Results



Gambar 1. Konseptual Penelitian Kebijakan Pendirian Sekolah Baru
Sumber: Penelitian 2024

Analisis dan penelitian akademik tentang kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan penambahan kuota penyelenggaraan pendidikan dasar baru, baik dalam bentuk ruang kelas baru atau unit sekolah baru agar seluruh lulusan satuan Sekolah Dasar mampu mengakses

(ditampung) pada satuan Sekolah Menengah Pertama, begitu juga sebaliknya penyediaan unit sekolah baru pada satuan Sekolah Dasar dimaksudkan agar seluruh anak yang berada pada usia SD (7-12) dapat di tampung di satuan Sekolah Dasar sesuai dengan kebijakan tentang wajib belajar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Dalam penelitian kebijakan pendirian sekolah baru (**Gambar 1**), "*Input*" dapat merujuk pada data dan informasi yang relevan seperti kebutuhan masyarakat, potensi peserta didik, dan kondisi geografis Kota Tangerang Selatan. "*Proses*" melibatkan analisis dan penilaian terhadap data tersebut, yang dapat mencakup studi kelayakan, peninjauan kebijakan pendidikan yang ada, dan perencanaan strategis. "*Output*" adalah rekomendasi atau keputusan akhir mengenai pendirian sekolah baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.

Siklus umpan balik dalam diagram ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian kebijakan tidak bersifat final, melainkan terbuka untuk evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Umpan balik dari tahap "*Output*" kembali ke "*Input*" mencerminkan perlunya revisi atau perbaikan berdasarkan implementasi kebijakan dan respon dari masyarakat. Ini penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini mendorong proses kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

Nilai-nilai kebijakan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah nilai-nilai teoretis kebijakan, hukum (*policy*), sosiologis dan filosofis sebagai hak dan kewajiban dasar masyarakat menjadi inti pokok pentingnya peningkatan pelayanan dan akses kebijakan pendidikan dasar bagi masyarakat sehingga berimplikasi terhadap jumlah kebutuhan sekolah sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Penelitian ini bukan hanya menghasilkan nilai-nilai akademis teoretis akan tetapi juga menyajikan peta kondisi lokasi sekolah dengan menggunakan *Geographic Information System (GIS)*; yang menghasilkan informasi jumlah SD dan SMP baru yang benar-benar perlu didirikan dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia Pendidikan Dasar SD/ SMP sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UUPD No. 23/2014. Oleh karena itu, analisis kebutuhan sekolah ini dilakukan pada agregat wilayah terkecil dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa semua anak-anak usia 6-12 tahun ana-anak usia 13-15 tahun memperoleh kesempatan pendidikan.

Berdasarkan kepada selisih dengan memperhitungkan APS SMP ternyata ada sedikit perbedaan dengan menggunakan rumus proyeksi, namun perbedaan tersebut tidak begitu mencolok kecuali untuk Kecamatan Serpong, dengan menggunakan rumus proyeksi Kecamatan Serpong tidak mengalami kekurangan RKB atau Unit Sekolah Baru SMP, sedangkan dengan rumus selisih Kecamatan Serpong ternyata memiliki selisih kekurangan antara jumlah lulusan dengan RKB yang tersedia di RKB SMP sebanyak 4 Ruang Kelas Baru atau sama dengan kekurangan 0,1 USB (Unit Sekolah Baru). Secara keseluruhan kekurangan Unit Sekolah Baru di satuan SMP jika seluruh lulusan SD yang ada di kelas 6 melanjutkan studinya ke kelas 7 (SMP) dengan memperhitungkan APS 98,20, maka Kota Tangerang Selatan perlu membangun USB SMP sebanyak 17 Unit Sekolah Baru SMP pada tahun 2024, jika satu SMP rata-rata memiliki 33 Rombel dari data Dapodik Kota Tangerang tahun 2023. Sedangkan jika menggunakan rumus proyeksi dengan memperhitungkan jumlah penduduk usia SMP 13-15 tahun maka Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 membutuhkan USB SMP Baru sebanyak 14 Unit Sekolah Baru SMP.

Tabel 1. Perbandingan SD/SMP Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Selatan Berdasar Kecamatan

Kecamatan	Rumus Proyeksi		Rumus Selisih (APS)	
	RKB	USB SMP	RKB	USB SMP
Kec. Pondok Aren	95	3	193	5
Kec. Pamulang	155	5	128	3
Kec. Serpong	Mencukupi	Mencukupi	14	0,4
Kec. Ciputat	84	3	111	3
Kec. Ciputat Timur	64	2	24	0,7
Kec. Serpong Utara	24	0,7	55	1
Kec. Setu	45	1	58	1
Total	467	14	584	17

Sumber: Penelitian 2024

Berdasarkan **Tabel 1**, selisih kebutuhan RKB (USB SMP) perbandingannya tidak terlalu jauh, oleh karena itu kebijakan atau pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan penyediaan RKB atau USB SMP sangat bergantung pada kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan juga ketersediaan anggaran serta urgensi pembangunan SMP yang secara akademik sosial diperlukan. Perhitungan-perhitungan tersebut sudah sesuai dengan rumus standar yang biasa dipergunakan oleh lembaga-lembaga di dunia Pendidikan. Analisis kebutuhan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB) SMP di Kota Tangerang Selatan menunjukkan perbedaan signifikan di setiap kecamatan. Kecamatan Pondok Aren dan Pamulang, misalnya, menunjukkan kebutuhan tinggi untuk RKB dan USB SMP. Pondok Aren membutuhkan tambahan 193 RKB dan 5 USB SMP, sementara Pamulang membutuhkan tambahan 128 RKB dan 3 USB SMP. Kebutuhan ini mencerminkan tingginya angka lulusan SD yang harus melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP, serta ketidakcukupan fasilitas pendidikan yang ada saat ini.

Di sisi lain, kecamatan seperti Serpong menunjukkan bahwa kebutuhan fasilitas pendidikan sudah mencukupi, meskipun terdapat kebutuhan tambahan yang kecil yaitu 14 RKB dan 0,4 USB SMP. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan di Serpong sudah relatif baik dan dapat mengakomodasi pertumbuhan jumlah peserta didik. Sebaliknya, kecamatan Ciputat Timur dan Serpong Utara menunjukkan kebutuhan mendesak yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lain, dengan Ciputat Timur memerlukan 24 RKB dan 0,7 USB SMP, serta Serpong Utara memerlukan 55 RKB dan 1 USB SMP. Secara keseluruhan, total kebutuhan untuk RKB di Kota Tangerang Selatan adalah 467, sementara total kebutuhan untuk USB SMP adalah 14. Namun, jika dibandingkan dengan proyeksi, kebutuhan aktual jauh lebih besar, dengan total 584 RKB dan 17 USB SMP. Kesenjangan ini menyoroti perlunya kebijakan pembangunan sekolah yang lebih terencana dan prioritas yang lebih tinggi untuk menangani ketidakseimbangan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Upaya yang lebih fokus dan terstruktur untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan akan membantu memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Kota Tangerang Selatan.

Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan terus meningkat, hal itu berdampak terhadap tingginya jumlah lulusan sekolah dasar, oleh karena itu kebijakan penyediaan sekolah baru khususnya satuan SMP sangat perlu dilakukan hal itu tampak dari jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang sangat terbatas khususnya di daerah-daerah tertentu yang ketersediaan SMP Negeri maupun SMP Swasta terbatas sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SMP). Kondisi perbandingan tersebut dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan SD/SMP Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Selatan Berdasar Kecamatan

No	Kecamatan	SD						SMP					
		Status			Peserta didik			Status			Peserta didik		
		N	S	N + S	N	S	N + S	N	S	N + S	N	S	N + S
1	Pondok Aren	35	43	78	16.119	13.436	29.555	3	44	47	4.168	7.445	11.613
2	Pamulang	28	45	73	16.225	10.374	26.599	5	37	42	6.210	4.923	11.133
3	Serpong	21	39	60	9.659	11.551	21.210	4	37	41	4.529	5.318	9.847
4	Ciputat	27	27	54	15.494	8.455	23.949	3	34	37	2.667	5.940	8.607
5	Ciputat Timur	18	11	29	10.568	2.274	12.842	4	15	19	5.621	2.408	8.029
6	Serpong Utara	16	19	35	7.419	6.124	13.543	3	16	19	2.897	3.449	6.346
7	Setu	12	3	15	6.914	1.174	8.088	2	8	10	1.996	1.590	3.586
Total		157	187	344	82.398	53.388	135.786	24	191	215	28.088	31.073	59.161

Sumber: Dapodik SD SMP Kota Tangerang Selatan Tahun 2022/2023

Tabel 2 menunjukkan perbandingan jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta dengan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Kota Tangerang Selatan, yang hampir mencapai rasio 1:1,59. Jika semua peserta didik SD melanjutkan ke SMP, fasilitas yang tersedia saat ini kemungkinan besar tidak akan cukup, khususnya di wilayah dengan perbandingan SD ke SMP yang tinggi. Misalnya, terdapat 157 SD Negeri dan hanya 12 SMP Negeri, menunjukkan perbandingan yang signifikan yaitu 1:6. Jika digabung dengan sekolah swasta, situasi masih menunjukkan bahwa kapasitas SMP belum mencukupi, terutama di beberapa kecamatan seperti Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat.

Analisis lebih mendalam mengungkap bahwa setiap kecamatan memiliki kondisi berbeda terkait ketersediaan SMP. Kecamatan Pondok Aren memiliki rasio SMP Negeri terhadap SD Negeri sebesar 1:11, Ciputat sebesar 1:9, Serpong Utara sebesar 1:5, dan Setu sebesar 1:6. Disparitas ini menunjukkan adanya ketidakmerataan yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pertumbuhan penduduk, persebaran permukiman, dan perbedaan aksesibilitas geografis. Kecamatan Pondok Aren dan Ciputat, yang memiliki perbandingan paling tinggi, adalah wilayah dengan tingkat populasi anak usia sekolah yang terus meningkat, namun belum diimbangi dengan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai. Sementara itu, Kecamatan Serpong Utara dan Setu juga mengalami defisit kapasitas meskipun dengan kebutuhan yang relatif lebih kecil.

Disparitas ini menunjukkan perlunya kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masing-masing kecamatan. Untuk menyesuaikan dengan kondisi spesifik tersebut, kebijakan pendidikan di Kota Tangerang Selatan perlu dirancang dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan SMP di wilayah dengan ketimpangan fasilitas yang paling parah. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah penerapan sistem zonasi dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk usia sekolah, sekaligus mendorong pembangunan SMP di area yang paling membutuhkan melalui insentif pengalokasian anggaran khusus.

Pemetaan melalui *Geographic Information System* (GIS) memungkinkan analisis kebutuhan yang lebih terperinci. GIS dapat membantu mengidentifikasi wilayah spesifik dalam setiap kecamatan yang paling jauh dari akses SMP dan mengarahkan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan dapat lebih adaptif dan mampu menjawab kebutuhan masing-masing kecamatan, memastikan bahwa setiap anak usia sekolah memiliki akses ke fasilitas pendidikan berkualitas, serta mengurangi disparitas yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam mendirikan SMP baru sesuai standar kebijakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan.

Discussion

Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji kebijakan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kota Tangerang Selatan mengungkapkan beberapa nilai kebijakan mendasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai teoretis kebijakan, aspek hukum, serta pertimbangan sosiologis dan filosofis yang terkait dengan hak dan kewajiban dasar masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Kebijakan pendirian sekolah baru didorong oleh tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan akses pendidikan dasar bagi masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan akan sekolah baru seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk (Nasir *et al.*, 2023; Teja, 2015). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan peta kondisi lokasi sekolah dengan menggunakan *Geographic Information System* (GIS), yang memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam hal jumlah Sekolah Dasar (SD) dan SMP baru yang perlu didirikan untuk memastikan pemerataan kesempatan belajar. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada nilai-nilai teoretis, tetapi juga mencakup analisis empiris yang mendalam mengenai kebutuhan sekolah di tingkat wilayah terkecil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak usia 6-12 tahun (untuk SD) dan 13-15 tahun (untuk SMP) di Kota Tangerang Selatan mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Penggunaan GIS dalam penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memetakan kebutuhan sekolah secara akurat, yang memungkinkan perencanaan yang lebih terarah dan efisien dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UUPD) No. 23 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya pemerataan penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah.

Dalam memperkirakan kebutuhan SMP di Kota Tangerang Selatan, penelitian ini mengidentifikasi besaran sekolah (*school size*) sebagai variabel yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Ukuran sekolah dapat memengaruhi kualitas pendidikan karena ukuran sekolah berhubungan langsung dengan kapasitas sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan (Díez *et al.*, 2020; Madani, 2019). Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada kelas-kelas besar cenderung memiliki mutu yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas-kelas kecil. Oleh karena itu, besaran rombongan belajar (rombel) menjadi salah satu faktor krusial yang dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan ruang kelas baru (RKB) atau unit sekolah baru (USB). Analisis ini menegaskan bahwa kebijakan mendirikan ruang kelas baru harus memperhatikan besaran rombel untuk memastikan mutu pendidikan yang optimal. Menariknya, penelitian ini juga mengungkapkan perbedaan kecil dalam hasil perhitungan kebutuhan RKB atau USB SMP berdasarkan dua rumus yang digunakan: rumus proyeksi dan rumus selisih dengan memperhitungkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meskipun terdapat perbedaan, hasil tersebut tidak terlalu signifikan, kecuali di Kecamatan Serpong. Menurut rumus proyeksi, Kecamatan Serpong tidak memerlukan tambahan RKB atau USB SMP, namun dengan menggunakan rumus selisih, ditemukan kekurangan 4 RKB atau 0,1 USB di kecamatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemilihan metode perhitungan dapat mempengaruhi hasil, meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu besar secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan beberapa tren yang terjadi di daerah lain, terutama terkait kebutuhan mendesak untuk penambahan fasilitas pendidikan menengah akibat pertumbuhan populasi peserta didik yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sekolah. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Kota Batu, Indonesia, juga menemukan ketimpangan serupa antara jumlah SD dan SMP, yang memengaruhi akses peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang menengah. Temuan ini sejalan dengan tren di berbagai wilayah perkotaan yang mengalami tantangan serupa dalam memastikan pemerataan fasilitas pendidikan (Setyawan & Firdausi, 2021). Namun, hasil penelitian ini juga

mengungkapkan perbedaan spesifik, terutama terkait dengan kecamatan yang memiliki variasi kebutuhan berdasarkan perhitungan dua model (proyeksi dan selisih). Misalnya, perhitungan dengan rumus selisih menunjukkan kebutuhan tambahan di Kecamatan Serpong, sedangkan perhitungan proyeksi menunjukkan sebaliknya. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh kondisi lokal unik di Kota Tangerang Selatan, seperti dinamika penduduk yang cepat berubah di daerah tertentu dan adanya perbedaan dalam distribusi sekolah swasta dan negeri. Hasil yang tidak terduga ini menyoroti pentingnya penggunaan metode perhitungan yang beragam untuk mendapatkan gambaran kebutuhan yang lebih akurat serta pentingnya adaptasi kebijakan yang spesifik untuk tiap kecamatan. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya tentang pentingnya kebijakan berbasis data yang responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pendidikan, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan pendidikan yang bervariasi.

Berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dengan menggunakan rumus selisih, Kota Tangerang Selatan membutuhkan 17 USB SMP baru pada tahun 2024 jika seluruh lulusan SD melanjutkan studinya ke SMP dengan memperhitungkan APS 98,20%. Di sisi lain, rumus proyeksi memperkirakan bahwa Kota Tangerang Selatan memerlukan 14 USB SMP baru pada tahun yang sama. Perbedaan ini, meskipun kecil, menunjukkan pentingnya pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan sekolah baru. Ketika pembangunan sekolah baru, perlu banyak pertimbangan secara pelaksanaan pendidikan di sekolah. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk usia sekolah dan kapasitas sekolah yang ada harus diperhitungkan secara seksama. Keputusan terkait pembangunan dan penyediaan RKB atau USB SMP di Kota Tangerang Selatan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah serta ketersediaan anggaran. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mempertimbangkan urgensi pembangunan SMP baru berdasarkan kebutuhan akademik dan sosial yang telah diidentifikasi.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kota Tangerang Selatan sangat mendesak untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, khususnya di kecamatan dengan ketimpangan fasilitas yang tinggi seperti Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat. Hasil penelitian mengungkapkan ketidakseimbangan antara jumlah Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang ada, yang berdampak pada keterbatasan kapasitas untuk menampung lulusan SD di jenjang pendidikan menengah. Implikasi strategis dari penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu segera merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara efektif untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang meningkat. Selain itu, analisis temuan menunjukkan bahwa pentingnya pertimbangan terhadap besaran rombongan belajar (rombel) dalam penentuan kapasitas sekolah, sehingga mutu pendidikan dapat tetap terjaga. Pendekatan adaptif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan teknologi *Geographic Information System* (GIS), direkomendasikan untuk pemetaan kebutuhan fasilitas pendidikan secara akurat, sehingga prioritas pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi demografis dan geografis tiap wilayah.

Saran

Sebagai rekomendasi, pemerintah Kota Tangerang Selatan disarankan untuk melakukan penelitian mendalam mengenai kebutuhan pendidikan di masa mendatang, termasuk proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan juga penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dengan perkembangan kondisi sosial dan demografis. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat

dalam penyediaan fasilitas pendidikan agar pemerataan pendidikan dapat tercapai secara lebih cepat dan efisien. Pemerataan pendidikan dasar adalah faktor penting mengingat kebijakan wajib belajar yang telah diundangkan oleh pemerintah, sehingga kebijakan pemerataan pendidikan dasar bermutu harus terus dikawal oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan karena memiliki dasar akademis, filosofis, sosial, dan politik yang kuat.

Pembangunan unit sekolah baru pada jenjang pendidikan dasar merupakan kewajiban dan kewenangan sesuai amanat otonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis, pembangunan ruang kelas baru atau unit sekolah baru merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan untuk memastikan pemerataan dan akses pendidikan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2024, pembangunan satuan sekolah baru SMP diperlukan hampir di seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan, kecuali Kecamatan Serpong yang dianggap sudah memadai berdasarkan kondisi dan jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berdasarkan perhitungan, jumlah satuan USB SMP yang dibutuhkan pada tahun 2024 mencapai 467 RKB atau memerlukan pembangunan 14 USB SMP. Sejalan dengan perkembangan penduduk usia pendidikan dasar, pada tahun 2028 diperkirakan akan diperlukan 549 RKB atau 16 USB SMP. Namun, kebutuhan pembangunan USB SMP harus disesuaikan dengan kebijakan anggaran yang tersedia serta kebutuhan mendesak di setiap kecamatan, dengan prioritas pembangunan USB SMP paling mendesak di Kecamatan Pamulang, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, dan Setu.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Ajjawi, R., Tai, J., Huu Nghia, T. L., Boud, D., Johnson, L., & Patrick, C.-J. (2020). Aligning assessment with the needs of work-integrated learning: The challenges of authentic assessment in a complex context. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 45(2), 304-316.
- Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Achmad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). Hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di Era Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 4(1), 141-153.
- Al-Sabbagh, T. A. (2022). GIS location-allocation models in improving accessibility to primary schools in Mansura city-Egypt. *GeoJournal*, 87(2), 1009-1026.
- Bellei, C., & Munoz, G. (2023). Models of regulation, education policies, and changes in the education system: A long-term analysis of the Chilean case. *Journal of Educational Change*, 24(1), 49-76.
- Bibri, S. E., Krogstie, J., & Kärrholm, M. (2020). Compact city planning and development: Emerging practices and strategies for achieving the goals of sustainability. *Developments in the Built Environment*, 4(1), 1-20.
- Bovill, C., & Woolmer, C. (2019). How conceptualisations of curriculum in higher education influence student-staff co-creation in and of the curriculum. *Higher Education*, 78(3), 407-422.

- Díez, F., Villa, A., López, A. L., & Iraurgi, I. (2020). Impact of quality management systems in the performance of educational centers: Educational policies and management processes. *Heliyon*, 6(4), 1-7.
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Dinamika sosial dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan Islam. *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 14(2), 45-67.
- Gunawan, B. (2020). Analisis yuridis pendidikan jarak jauh dalam perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387-403.
- Heilmann, J., & Bertone, A. (2021). Identification of gaps in training, research, and school-based practice: a survey of school-based speech-language pathologists. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 52(4), 1061-1079.
- Kieran, L., & Anderson, C. (2019). Connecting universal design for learning with culturally responsive teaching. *Education and Urban Society*, 51(9), 1202-1216.
- Köse, M., Koçyiğit, M., Erdem, C., & Jega, I. M. (2021). An evaluation of accessibility to preschool education institutions using geographic information systems. *Education and Information Technologies*, 26(4), 4307-4328.
- Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihayati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai benang kusut kebijakan pendidikan Indonesia: Sebuah literature review analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1810-1826.
- Madani, R. A. (2019). Analysis of educational quality, a goal of education for all policy. *Higher Education Studies*, 9(1), 100-109.
- Maige, G. A., Mosha, H. J., & Muteti, C. M. (2022). Effectiveness of school mapping and micro-planning on improving the quality of teaching and learning facilities in public primary schools in Arusha Region. *British Journal of Education*, 10(11), 84-102.
- Martin, F., Ritzhaupt, A., Kumar, S., & Budhrani, K. (2019). Award-winning faculty online teaching practices: Course design, assessment and evaluation, and facilitation. *The Internet and Higher Education*, 42(1), 34-43.
- Menggo, S., Suastra, I., Budiarsa, M., & Padmadewi, N. N. (2019). Needs analysis of academic-English speaking material in promoting 21st century skills. *International Journal of Instruction*, 12(2), 739-754.
- Mpuangan, K. N., & Ntombela, S. (2024). Community voices in curriculum development. *Curriculum Perspectives*, 44(1), 49-60.
- Nasir, M., Mahmudinata, A. A., Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi pemberdayaan sekolah sebagai upaya peningkatan manajemen pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 799-816.
- Nasril, Y., Sirozi, M., & Sumanti, S. T. (2024). Analysis of the implementation and aspirations of national education politics in Muhammadiyah circles. *Inovasi Kurikulum*, 21(3), 1449-1464.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(1), 13-21.
- Okolie, U. C., Nwosu, H. E., & Mlanga, S. (2019). Graduate employability: How the higher education institutions can meet the demand of the labour market. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 9(4), 620-636.

- Pak, K., Polikoff, M. S., Desimone, L. M., & Saldívar García, E. (2020). The adaptive challenges of curriculum implementation: Insights for educational leaders driving standards-based reform. *Aera Open*, 6(2), 233285842093282.
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis masalah-masalah pendidikan dan tantangan pendidikan nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794-805.
- Paul, P. V. (2024). A few more perspectives on conducting and interpreting research... or, perhaps, getting to the "truth". *American Annals of the Deaf*, 168(5), 233-236.
- Pei, T., Xu, J., Liu, Y., Huang, X., Zhang, L., Dong, W., Qin, C., Song, C., Gong, J., & Zhou, C. (2021). GIScience and remote sensing in natural resource and environmental research: Status quo and future perspectives. *Geography and Sustainability*, 2(3), 207-215.
- Penuel, W. R., Riedy, R., Barber, M. S., Peurach, D. J., LeBouef, W. A., & Clark, T. (2020). Principles of collaborative education research with stakeholders: toward requirements for a new research and development infrastructure. *Review of Educational Research*, 90(5), 627-674.
- Rosser, A. (2023). Higher Education in Indonesia: The political economy of institution-level governance. *Journal of Contemporary Asia*, 53(1), 53-78.
- Sami, K. A., & Hussein, H. O. (2024). Prospects of implementing geospatial information to revolutionize Sudans mining investment. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*, 7(1), 230-239.
- Setyawan, D., & Firdausi, F. (2021). Formulasi kebijakan: Tahap agenda setting pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 126-142.
- Shaturaev, J. (2021). 2045: Path to nation's golden age (Indonesia Policies and Management of Education). *Science and Education*, 2(12), 866-875.
- Sumiyaty, S., Prastiwi, S. D., Yuliana, S., & Mardiyanti, W. T. (2023). Komparasi sistem pendidikan Indonesia dengan negara-negara OECD. *Journal of Contemporary Issue in Elementary Education*, 1(2), 140-156.
- Surur, M., Wibawa, R. P., Jaya, F., Suparto, A. A., Harefa, D., Faidi, A., Triwahyuni, E., Suartama, I. K., Mufid, A., & Purwanto, A. (2020). Effect of education operational cost on the education quality with the school productivity as moderating variable. *Psychology and Education*, 57(9), 1196-1205.
- Sutcher, L., Darling-Hammond, L., & Carver-Thomas, D. (2019). Understanding teacher shortages: An analysis of teacher supply and demand in the United States. *Education Policy Analysis Archives*, 27(35), 1-40.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130.
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 63-76.
- Triarsuci, D., Al-Qodri, H. T., Rayhan, S. A., & Marini, A. (2024). Manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur Sekolah Dasar: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 15-15.
- Wang, C., Zhang, M., Sesunan, A., & Yolanda, L. (2023). Peran teknologi dalam transformasi pendidikan di Indonesia. *Kemdikbud*, 4(2), 1-7.

- Welsh, R. O., & Swain, W. A. (2020). (Re)defining urban education: A conceptual review and empirical exploration of the definition of urban education. *Educational Researcher*, 49(2), 90-100.
- Widhawati, D. N. (2022). Community engagement plan online students help for Indonesian school In Riyadh, Saudi Arabia. *Journal of Management and Social Sciences*, 1(3), 26-35.
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan yuridis penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 80-102.
- Zancajo, A. (2020). Schools in the marketplace: Analysis of school supply responses in the Chilean education market. *Educational Policy*, 34(1), 43-64.
- Zhou, C., Su, F., Pei, T., Zhang, A., Du, Y., Luo, B., Cao, Z., Wang, J., Yuan, W., & Zhu, Y. (2020). COVID-19: Challenges to GIS with big data. *Geography and Sustainability*, 1(1), 77-87.